



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SYAIKHU
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 75541

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.875.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 1748 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/100 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/100 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m²/200 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 347.800.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.700.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.400.000
6. MOTOR, HONDA X1H02N35M1AJT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.200.000
7. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	862.647.669
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.090.247.669
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.090.247.669

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.